

TESIS

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

(Study Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan)



Diajukan Oleh :

Nama : Rochman Arif

NPM : 16440017

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
TAHUN 2018

TESIS

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL**

(Study Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan)

Diajukan Oleh :

Nama : Rochman Arif

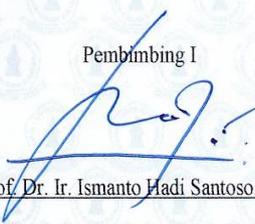
NPM : 16440017

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA**

TAHUN 2018

Lembar Pengesahan
Tesis Telah Disetujui
Pada Tanggal 13 Agustus 2018

Pembimbing I


Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi Santoso, MS

Pembimbing II


Drs. Ec. Iman Karjadi, M.M. Ak. CA

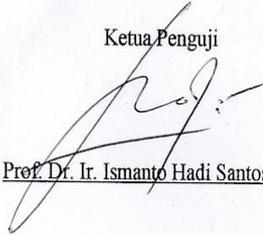
Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Tantri Bararoh, Ak, M.Ak

Tesis ini telah diuji dan dinilai
Oleh panitia penguji pada
Program Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Pada tanggal 16 Agustus 2018

Panitia Penguji

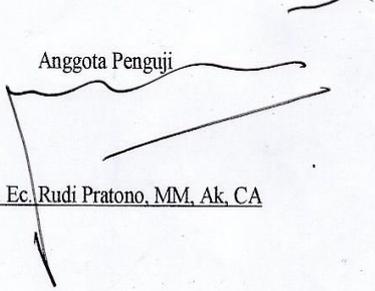
Ketua Penguji


Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi Santoso, MS

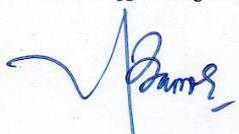
Sekretaris Penguji


Dra. Lilik Pirmaningsih, Ak, M.Ak, CA

Anggota Penguji


Drs. Ec. Rudi Pratono, MM, Ak, CA

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi
Pada tanggal 16 Agustus 2018


Dr. Tantri Bararoh, Ak, M.Ak
Ketua Program Studi Magister Akuntansi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rochman Arif

NPM : 16440017

Alamat : Desa Karang Langit RT 03 / RW 01, Kec. Lamongan Kab.
Lamongan.

Program Studi : Magister Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul **FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI STANDART AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (Study Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan)**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan



(Rochman Arif)
NPM : 16440017

MOTTO

*Tak Usah Engkau Tangisi Kekurangan Yang
Engkau Miliki.*

*Dan Cepatlah Engkau Menyadari Bahwa Semua Itu
Tidak Lah Berarti.*

*Kesungguhan Hati & Keteguhan Hati Itu Lah Yang
Lebih Berarti Tuk Lalui Hidup Ini.*

Dan Seburuk Apapun Raga Yang Kau Miliki.

*Itu Semuanya Akan Lebih Berarti Jika Engkau
Memiliki.*

Rasa Bersyukur Di Hati.

PERSEMBAHAAN

Bismillahirrohmanirohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang...

Dengan ini saya persembahkan karya ini kepada:

1. Alm. Bapak yang sangat saya banggakan atas limpahan kasih sayangnya membuat diriku selalu terus berusaha.
2. Ibu yang sangat saya sayangi atas limpahan doa dan kasih sayangnya membuat saya selalu memberikan yang terbaik.
3. *My Best Partner* Dunia Akhirat selalu mendukung dan membantu saya dalam berjuang.
4. Dosen Pembimbing yang senantiasa mengajarkan hal-hal yang terbaik
5. Teman-teman seperjuangan Magister Akuntansi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' Alamin

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan tesis ini dengan judul “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Study Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Lamongan)” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan, dorongan moral serta spiritual, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma.
2. Bapak Drs. Ec. Iman Karyadi, Ak., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran secara sabar dan penuh kasih sayang untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Dr. Tantri Bararoh, Ak., M.Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membina kami dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Prof Dr. Ir. Ismanto Hadi Santoso, MS. selaku Pembimbing utama saya yang telah banyak membantu dan mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dengan sabar dan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen yang telah menyumbangkan ilmunya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Ibuku Siti Asiyah dan *My Best Partner* Dunia Akhirat Iswanti, SE, yang telah memberikan dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada penulis.
7. Saudara – Saudaraku serta Bu lik dan Pak lik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan program Pascasarjana ini.

8. Seluruh rekan-rekan di SKPD di Kabupaten Lamongan yang telah mendukung penulis dan bersedia memberikan waktunya untuk pengisian kuesioner dalam penelitian ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan saran-saran yang berarti bagi penulis.
10. Seluruh rekan – rekan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, yang selalu senantiasa memberikan dukungan dan saran-saran yang berarti bagi penulis.

Akhirnya semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan hidayah-NYA, serta memberikan kemudahan bagi kita semua dalam melaksanakan kebaikan dan amal sholeh. Amin.

Surabaya, Agustus 2018
Penulis,

Rochman Arif

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini untuk menguji serta menganalisis pengaruh variabel sumber daya manusia, perangkat pendukung, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual di pemerintahan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lamongan sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 responden yang terdiri dari 36 SKPD di Kabupaten Lamongan. Alat analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, menggunakan bantuan aplikasi *SPSS versi 20*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara persial variabel sumber daya manusia, perangkat pendukung, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Lamongan. secara simultan sumber daya manusia, perangkat pendukung, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Lingkungan pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Kata Kunci : Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Implementasi SAP Berbasis Akrual.

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine and analyze the influence of variables of human resources, supporting devices, leadership style, organizational commitment and utilization of information technology on the accrual-based SAP implementation in the government of Lamongan Regency. This study was conducted in Lamongan Regency in this study as many as 97 respondents consisting of 36 SKPD in Lamongan Regency. Data analysis tools in this study used multiple linear regression analysis, using the help of SPSS version 20. The results of this study indicate that variables are human resources, supporting devices, leadership style, organizational commitment and information technology utilization. affect the accrual-based SAP implementation in the Lamongan Regency government environment. Simultaneously human resources, supporting devices, leadership style, organizational commitment and utilization of information technology have a positive effect on the implementation of SAP accrual basis in the Lamongan Regency government environment.

Keywords : Human Resources, Supporting Devices, Leadership Style, Organizational Commitment, Information Technology Utilization and Accrual Based SAP Implementation.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Depan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Penetapan Panitia Penguji	iv
Pernyataan Bebas Plagiasi	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Abstack	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Telaah Teori	8
2.1.1 Perkembangan Standart akuntansi berbasis kas menuju berbasis akrual	8
2.1.2 <i>Teori New Public Management (NPM)</i>	11
2.1.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrual	12
2.1.4 Standart Akuntansi Pemerintahan.....	21
2.1.5 Keterkaitan Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	23
2.1.6 Keterkaitan Perangkat Pendukung Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	24
2.1.7 Keterkaitan Gaya Kepemimpinan Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	25
2.1.8 Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.....	26

2.1.9 Keterkaitan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua	27
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	28
2.3 Hipotesis	40

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	42
3.2 Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel	42
3.2.1 Populasi	42
3.2.2 Sampel	44
3.2.3 Metode Pengambilan Sampel	44
3.3 Variabel Penelitian	47
3.3.1 Variabel Dependen	47
3.3.2 Variabel Independen	48
3.4 Instrumen Penelitian	55
3.4.1 Uji Validitas	55
3.4.2 Uji Reliabilitas	56
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	56
3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	58
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	59
3.5.1 Studi Internet	60
3.6.1 Studi Pustaka	60
3.7.1 Studi Lapangan	60
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian	60

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data Hasil Penelitian	61
4.1.1 Gambaran Umum Responden	61
4.1.2 Hasil Uji Kualitas Data	63
4.1.3 Hasil Uji Koefisiensi Determinansi	68
4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	69
4.1.5 Hasil Uji asumsi Klasik	73
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	77
4.2.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua	77
4.2.2 Pengaruh Perangkat Pendukung terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua	78
4.2.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua	79
4.2.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua	81

4.2.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis akrual	82
4.2.6 Pengaruh Secara Simultan Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual	83

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	87
----------------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Reformasi akuntansi Pemerintahan	9
Tabel 2.2 Perbedaan laporan Keuangan PP No. 24 tahun 2005 dengan PP No. 71 tahun 2010.....	10
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Rekapitulasi Jumlah Populasi Penelitian	43
Tabel 3.2 Rekapitulasi Jumlah Sampel Penelitian	46
Tabel 4.1 Tabel Distribusi Kuisoner	61
Tabel 4.2 Demografi Responden.....	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	64
Tabel 4.4 Hasil Uji Reabilitas	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisiensi Determinansi	68
Tabel 4.6 Hasil Uji T.....	69
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	77
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas	78
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Gambar Model Analisis	41
Gambar 4.1 Hasil uji Heterokedasitas.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I. Kuisoner Penelitian	89
Lampiran II. Hasil Uji Validitas Item variabel Sumber Daya Manusia.....	100
Lampiran III. Hasil Uji Validitas Item variabel Perangkat Pendukung	101
Lampiran IV. Hasil Uji Validitas Item variabel Gaya kepemimpinan.....	102
Lampiran V. Hasil Uji Validitas Item variabel Komitmen Organisasi	103
Lampiran VI. Hasil Uji Validitas Item variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	104
Lampiran VII. Hasil Uji Validitas Item variabel Implementasi SAP Berbasis aktual	105
Lampiran VIII. Hasil Uji Reliabilitas	106
Lampiran IX. Hasil Uji Normalitas.....	107
Lampiran X. Hasil Uji Multikolinieritas	108
Lampiran XI. Hasil Heterokedasitas	109
Lampiran XII. Hasil Uji Koefisiensi Determinansi	110
Lampiran XIII. Hasil Uji F	111
Lampiran XIV. Hasil Uji T	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 mengamanatkan instansi pemerintah baik dipusat maupun didaerah untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. Dengan adanya Undang Undang tersebut terjadi perubahan pada basis akuntansi sektor publik dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual (Riyani dkk, 2017). Dalam UU No. 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual harus dilaksanakan selambat – lambatnya dalam 5 (lima) tahun setelah diterbitkan UU tersebut, namun karena pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang pasti dan khusus mengenai SAP berbasis akrual, dan diperkuat pula oleh penjelasan pada pasal yang sama dalam UU No. 17 tahun 2003, menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas (Arih.dkk, 2017).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran (Lamonisi, 2016). Dari fenomena tersebut maka lahir PP No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis *Cash Toward Accrual* yang kemudian diikuti dengan lahirnya PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, dimana ini merupakan suatu keinginan dari berbagai pihak untuk dapat menciptakan suatu pengelolaan keuangan publik yang lebih transparansi dan dapat memperbaiki *efisiensi* dan *efektivitas public* (Kristiyawati.2015).

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambatlambatnya tahun 2015 (Putra dan Ariyanto, 2015).

Penerapan SAP Berbasis Akrua bukanlah merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Implementasi harus dilakukan secara hati-hati dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan terstruktur terkait

dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia (SDM). Keberhasilan penerapan SAP Berbasis Akruwal sangat diperlukan agar pemerintah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel (Asri, 2015).

Pada saat penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015, yang sudah mengacu kepada PP No 71 tahun 2010, beberapa pemerintah daerah bahkan meminta bantuan konsultan untuk mendampingi proses penyusunan laporan keuangan tersebut, namun dari survey awal yang dilakukan oleh peneliti, ternyata penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah tidak semulus yang diharapkan, meskipun sebagian besar laporan keuangan pemda diberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), pemda masih menghadapi kendala dalam proses pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akruwal tersebut (Puspitasari.dkk, 2016). Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akruwal membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akruwal menjadi basis akruwal penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja (Lamonisi, 2016). Penerapan basis akruwal dalam akuntansi pemerintahan diatur oleh

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 tahun 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013. Dalam penerapan basis akrual dalam belum sepenuhnya dapat dijalankan karena tidak semua anggota instansi pemerintahan memahami pencatatan laporan keuangan berbasis akrual dan tidak semua memiliki pendidikan akuntansi (Rosyadi dan Mulyani, 2017).

Banyak pro dan kontra mengenai pengimplementasian standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, hal ini lah yang mendasari penelitian ini untuk dilakukan . Penelitian ini sendiri akan dilakukan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan hal ini dilakukan karena. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 071/LHP/XVIII.SBY/06/2017 tanggal 30 Mei 2017, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) (<http://surabaya.bpk.go.id/new/?p=18525>). Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten Lamongan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 seyogyanya penerapan Standart Akuntansi Berbasis Akrual di Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik. Serta belum adanya *riset* sebelumnya yang dilakukan untuk menguji dan menganalisis terhadap faktor – faktor yang melatarbelakangi implementasi

Standart Akuntansi Berbasis Akrua di Kabupaten Lamongan, hal ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor sumber daya manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara persial berpengaruh positif terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan ?
2. Apakah faktor sumber daya manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Uraian dari Rumusan Masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah faktor sumber daya manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara persial berpengaruh positif terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan !
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah faktor sumber daya manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan !

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharap berguna bagi :

1. Penelitian selanjutnya

Diharap penelitian ini bisa menjadi daftar rujukan bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

2. Instansi – Instansi

Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Instansi – Instansi Pemerintahan terkait Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

3. Universitas

Dapat memberikan sumbangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Perkembangan Standart akuntansi Berbasis Kas menuju Berbasis Akrua

Salah satu perubahan yang positif adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga good governance dapat tercapai.(Niu.dkk, 2014).

Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja

berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Perubahan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual akan membawa dampak kepada pengelolaan keuangan Negara (Putra dan Ariyanto, 2015).

Tabel 2.1
Reformasi Akuntansi Pemerintahan

Tahun	Kejadian Penting
2003	Penerbitan UU No. 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara.
2005	Penerbitan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas Menuju Akrual.
2010	Penerbitan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dengan masa transisi 4 tahun.
2015	<i>Kick Off</i> Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
2015	Penerbitan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-9180/PB/2015 hal Penyusunan <i>Pseudo</i> Laporan Keuangan Tahun 2015.

Sumber : Herwiyanti,dkk (2017)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Diterapkannya standar akuntansi pemerintahan diharapkan akan adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ataupun daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Agar informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, yaitu yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Jalardi dan Riharjo, 2016).

Tabel 2.2

Perbedaan Laporan Keuangan PP No. 24 Tahun 2005 dengan PP No. 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (Basis Kas Menuju Akrual)	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Basis Akrual)
<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Realisasi Anggaran (LRA) · Neraca · Laporan Arus Kas · Catatan atas Laporan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> · Laporan Realisasi Anggaran (LRA) · Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) · Neraca · Laporan Arus Kas · Laporan Operasional · Laporan Perubahan Ekuitas · Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber : Rosyadi dan Mulyani (2017)

2.1.2 Teori New Public Management (NPM)

Praktik NPM yang mendasari pada teori ekonomi merupakan alasan dilakukannya adopsi sistem akuntansi akrual pada organisasi sektor publik. Dari perspektif teori ekonomi, dikatakan bahwa akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor public dapat ditingkatkan dengan mentransformasikan proses manajemen, evaluasi, dan pendanaan organisasi sektor publik ke dalam praktik manajemen sektor swasta (Harun dan Kamase) dalam (Herwiyanti,dkk.2017) . Di bawah prinsip-prinsip NPM, sejak tahun 1980-an praktik business-style dalam organisasi sektor publik di seluruh dunia telah dikembangkan (Broadbent dan Guthrie) dalam (Herwiyanti,dkk.2017).

Menurut Kristiawati (2015) *New Public Management* (NPM) merupakan system manajemen administrasi public yang paling actual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh Negara industri. *New Public Management* tidak selalu dipahami sama oleh orang. Bagi sementara orang, NPM adalah suatu system manajemen desentral dengan perangkat – perangkat manajemen baru seperti *controlling, benchmarking dan lean management* : bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Tujuan *New Public Management* adalah untuk merubah

administrasi public sedemikian rupa sehingga, walaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih bersifat seperti perusahaan. Adminstrasi public sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba.

2.1.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi Implementasi SAP berbasis Akrua

1. Sumber Daya Manusia

Faktor pertama yang menonjol terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Kristyono) dalam (Safitri, 2017). Hasil penelitian Arih,dkk (2017) menemukan bahwa kualitas SDM secara persial berpengaruh positif terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kota Bandung. Hasil penelitian yang dilakukan Widyastuti,dkk (2015) menunjukkan bahwa kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Gianyar belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual. Namun Hasil penelitian dari Hasil penelitian dari Sukadana dan Mimba (2015) juga menyebutkan bahwa Kualitas sumber daya manusia dibuktikan secara statistik berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian ini juga

menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Denpasar.

Menurut Sudarmanto dalam Ajhar,dkk (2015) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan, baik pada organisasi publik maupun private.

Menurut Jantong (2017) Kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Hasil penelitian Jantong (2017) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif dan positifpelatihan dan pendampingan terhadap kualitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering staf atau karyawan mengikuti pelatihan dan pendampingan akan meningkatkan keterampilan dan membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan, namun dalam penelitian ini tidak menemukan pengaruh yang positifantara kualitas sumber daya manusia terhadap penerapan standart akuntansi berbasis akrual.

Hasil penelitian Widyastuti,dkk (2015) menyimpulkan bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Gianyar dilihat dari kualitas sumber daya manusia (SDM) belum sepenuhnya menguasai basis akrual karena dalam menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA) masih perlu dilakukan pelatihan-pelatihan cara pengaplikasiannya.

2. Perangkat Pendukung

Sementara itu faktor kedua yang melatarbelakangi suksesnya implementasi standar akuntansi berbasis akrual adalah ketersediaan perangkat pendukung hal ini didukung oleh penelitian dari Hasil penelitian dari Norfalizah (2015) menjelaskan bahwa faktor perangkat pendukung berpengaruh positif terhadap penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akurual di Kabupaten Rokan Hilir. Namun kesiapan pemerintah dalam menyediakan perangkat pendukung dalam mensukseskan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih sangat belum optimal dan merata di seluruh daerah. hasil penelitian dari Langelo, dkk. (2015) hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah kota bitung belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010, hal ini dikarenakan terkendalanya kesiapan perangkat pendukung yang belum memadai. Namun hasil penelitian dari Jalardi dan Riharjo (2016) menemukan bahwa penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat efektif hal ini di karenakan ketersediaan Sarana dan prasaraana yang memadai.

Perangkat pendukung adalah ketersediaan perangkat yang membantu SDM dalam melaksanakan tugas seperti tersediannya

computer dan *software* yang berkaitan dengan kebutuhan dalam membantu penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah Sudaryati dan Herningsih dalam Arih.dkk, (2017).

Menurut Jantong (2017) ketersediaan sarana prasarana pada dasarnya memberikan kemudahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan produktifitas serta menimbulkan rasa nyaman bagi orang – orang yang berkepentingan.

Menurut Jalardi dan Riharjo (2016) Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan efektif dan dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hasil penelitian Jantong (2017) menemukan bahwa infrastruktur tidak berpengaruh terhadap kesiapan aplikasi penerapan standart akuntansi berbasis akrual di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Namun hasil penelitian dari Jalardi dan Riharjo (2016) menemukan bahwa sarana dan prasarana berpengaruh positif terhadap efektivitas

penerapan Standart Akuntansi Berbasis akrual di Lingkungan SKPD di Kabupaten Sidoarjo.

3. Gaya Kepemimpinan

Faktor ketiga yang melatarbelakangi suksesnya Implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah Gaya kepemimpinan Hasil penelitian dari Putra dan Ariyanto (2015) menemukan bahwa faktor gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan dalam SKPD, maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah kabupaten Badung. Namun hasil penelitian dari Arih, dkk (2017) menemukan bahwa faktor gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Bandung. Hal ini dikarenakan pegawai keuangan yang berkualitas tinggi tersebut tetap akan menjalankan seluruh tugas – tugasnya tanpa diberitahu atau dijelaskan beberapa kali pun oleh pimpinan. Pegawai bagian keuangan juga tetap akan menjalankan tugas – tugasnya, baik ada campur tangan yang besar oleh pimpinan maupun tidak ada Menurut Danim dalam Arih.dkk (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah setiap tindakan yang dilakukan individu atau kelompok untuk mengordinasikan dan

memberikan arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Slamet (2016) Dalam teori Total Quality Management, keberhasilan kepemimpinan ditunjukkan dengan adanya interaksi positif antara pimpinan puncak, manager divisi dan karyawan. Interaksi ditunjukkan kerjasama satu sama lainnya dalam menangani masalah organisasi. Para manager divisi berperan penting mengkomunikasikan aktivitas organisasi yang akan dilaksanakan sesama manager, demikian juga harus diteruskan kepada bawahan.

Menurut Arih,dkk. (2017) semakin baik/sesuai gaya kepemimpinan dalam sector pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan yang baik tentunya akan membawa dampak kenyamanan dan kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaannya sehingga akan membawa dampak optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, efektifitas, serta efisiensi dalam lingkup SAP berbasis akrual.

4. Komitmen Organisasi

Faktor Keempat yang melatarbelakangi suksesnya implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah komitmen organisasi hal ini didukung oleh penelitian dari Hasil penelitian dari Safitri (2017) menemukan bahwa secara persial komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian dari Karyogis dan Putra (2017) menemukan bahwa faktor komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bangli. Namun komitmen organisasi di tiap – tiap Daerah berbeda – beda hal ini didukung oleh penelitian dari Hasil penelitian Ranuba,dkk (2015) Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem akuntansi dan kebijakan akuntansi, menyusul dengan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang saat ini sedang dalam pembahasan di Pansus untuk lebih mempertegas kebijakan penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual ini. Namun Keterbatasan dana yang di alami oleh Dinas Pengelola Keuangan dan Aset terhadap tindakan sosialisasi di seluruh SKPD- SKPD di Minahasa selatan juga merupakan kendala yang sangat berpengaruh terhadap kesiapan penerapan akuntansi berbasis akrual ini. Sedangkan hasil penelitian dari

Wiranti (2016) menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah berkomitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu meningkatkan komitmen pimpinan untuk pelaksanaan SAP akrual tanpa adanya unsur kepentingan politik.

Komitmen merupakan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang (Simanjuntak) dalam (Karyogis dan Putra, 2017)

Menurut Norfalizah (2015) Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu/kelompok untuk melakukan sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu ataupun kelompok.

Menurut Jalardi dan Riharjo (2016) Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen untuk tanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut Karyogis dan Putra (2017) Mengubah kebiasaan pencatatan transaksi berbasis kas sangatlah tidak mudah menjadi pencatatan transaksi berbasis akrual, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi untuk melakukan perubahan pada kinerja pegawai dapat menerapkan akuntansi basis akrual dengan efektif dan efisien.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sedangkan faktor kelima yang melatarbelakangi suksesnya implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ialah faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi hal ini didukung oleh penelitaian dari Karyogis dan Putra (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. namun penelitian dari Adventana dalam Karyogis dan Putra (2017) menyatakan secara parsial system teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual didukung oleh Sugiarto dan Alfian Karyogis dan Putra (2017) yang menjelaskan bahwa faktor sistem informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual berdasarkan standar akuntansi pemerintahan Menurut Slamet (2016) Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi perkembangan teknologi informasi

direspons oleh organisasi dengan mendesain system informasi berbasis teknologi computer atau *Website*.

Menurut Kadir dan Triwahyuni dalam Supra (2016) mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi computer dan teknologi telekomunikasi. Bodnar dan Hopwood dalam Supra (2016) memaparkan bahwa teknologi informasi terdiri dari tiga (tiga) komponen utama yang terdiri dari :

- a). Perangkat Keras (*Hardware*)
- b). Perangkat Lunak (*Software*)
- c). Manusia (*Brainware*)

kualitas teknologi informasi diketahui dari kualitas komponen perangkat keras, perangkat lunak dan kualitas pemakai (manusia). Menurut Agustiawan dan Rasmini (2016) Kecepatan dan keakuratan yang diciptakan Teknologi Informasi (TI) akan meningkatkan kompetensi SDM dalam menyelesaikan tugas dengan produktivitas dan kualitas yang tinggi.

2.1.4 Standart Akuntansi Pemerintahan

Tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis Kas Menuju AkruaI yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akruaI. Namun, penerapan PP

No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas (Niu.dkk 2014).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Peraturan Pemerintah terbaru tentang Standart Pemerintahan (SAP) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. PP Nomor 71 Tahun 2010 diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.. 64 Tahun

2013 dalam lampiran II yang menyatakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) merupakan suatu instrument penting yang harus disiapkan dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. (Supra. 2016)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Lampiran 01 Kerangka Konseptual 8 menjelaskan bahwa yang menjadi komponen dalam Laporan keuangan Pemerintahan dengan Standart Akrual adalah sebagai berikut :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

2.1.5 Keterkaitan Sumber Daya Manusia Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Jantong (2017) Kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama operasi sebuah organisasi, termasuk jika ada

perubahan dalam organisasi. Suatu organisasi akan berhasil dalam melaksanakan setiap aktivitasnya jika didukung dengan sumber daya yang memiliki komitmen dan kompetensi, dan sebaliknya. Demikian juga dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, sumber daya manusia memegang peranan penting. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno dalam Putri) dalam (Puspitasari, dkk, 2016).

2.1.6 Keterkaitan Perangkat Pendukung Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Memasuki era modernisasi, pemerintah dan swasta mulai menggunakan komputer dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini tidak berlebihan karena dengan penggunaan komputer, efektifitas dan efisiensi kerja mengalami peningkatan. Pemerintah dalam melakukan pelaporan keuangan juga sudah menggunakan berbagai aplikasi program yang ditawarkan untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan dan dengan adanya ini, maka diyakini akan mempermudah SKPD dalam menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP Berbasis Akrual. Ketersediaan hardware dan software juga akan membuat penerapan SAP Berbasis Akrual berjalan dengan sempurna karena didukung oleh perangkat pendukung yang layak dan memadai.(Asri,

2015). System akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut agar system akuntansi keuangan pemerintahan daerah berjalan secara efektif maka diperlukan perangkat pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak. (Rahmansah,2012).

2.1.7 Keterkaitan Gaya Kepemimpinan Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Menurut Simanjuntak dalam Putra dan Ariyanto (2015) dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

Menurut Arih, dkk (2017) Semakin baik/sesuai gaya kepemimpinan dalam sector pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan yang baik tentunya akan membawa dampak kenyamanan dan

kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaannya sehingga akan membawa dampak optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, efektivitas, serta efisien dalam lingkup SAP berbasis akrual.

2.1.8 Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Menurut Robbins dalam Safitri (2017), komitmen organisasi adalah sebagai keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tersebut dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk memelihara keanggotanya dalam organisasi tersebut. Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki. Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah Aparat Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari Aparat Pemerintah Daerah akan berimplikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan anggaran tersebut.

Menurut Jalardi dan Riharjo (2016) Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen untuk bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut Ritonga dalam Putra dan Ariyanto (2015) menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama. (Simanjuntak dalam Karyogis dan Putra 2017). Mengubah kebiasaan pencatatan transaksi berbasis kas sangatlah tidak mudah menjadi pencatatan transaksi berbasis akrual, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi untuk melakukan perubahan pada kinerja pegawai dapat menerapkan akuntansi basis akrual dengan efektif dan efisien.

2.1.9 Keterkaitan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Selain pengembangan sistem yang baru faktor lain yang berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi merupakan media yang dipakai untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan setiap individu. Secara umum suatu teknologi informasi dapat memberikan banyak manfaat dalam membantu individu menyelesaikan tugas-tugasnya antara lain transaksi yang diproses dengan cepat, penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, data yang dapat disimpan dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, dalam Agustiawan dan Rasmini 2016).

Penerapan SAP berbasis akrual memerlukan persiapan sistem informasi akuntansi yang memadai, agar seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada SAP berbasis akrual dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem informasi merupakan sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mukhtar, dalam Karyogis dan Putra 2017).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian dari Putra dan Ariyanto (2015) dari Universitas Udayana Bali yang melakukan penelitian dengan judul Faktor – Faktor yang memengaruhi penerapan Standart Akuntansi Pemetintahan Berbasis Akrual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, komunikasi komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan terhadap kesiapan dalam penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah seluruh SKPD Kabupaten Badung yang mencakup kepala bidang, sekretaris, dan staf bagian keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, komunikasi, komitmen

organisasi, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian dari Widyastuti, dkk (2015) dari Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja Bali yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan interpretif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, antara lain; 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) kesiapan dari SDM pemerintah Kabupaten Gianyar belum siap karena masih dalam tahap pembelajaran untuk memahami penerapan SAP berbasis akrual, 2) kesiapan dari SIA menunjukkan bahwa sudah ada sistem khusus yang bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang digunakan dalam pelaporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Gianyar, dan 3) komitmen organisasi sangat mendukung penerapan basis akrual.

Penelitian dari Arih, dkk (2017) dari Universitas Telkom Bandung yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standart Akuntansi “ Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kesiapan

pemerintahan dalam implementasi SAP berbasis Akrua ini antara lain kualitas SDM, Perangkat Pendukung, dan Gaya kepemimpinan khususnya pada pemerintahan Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan aplikasi statistik data SPSS 20,0. Populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), penetapan sampel dengan menggunakan sampling sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM, dan perangkat Pendukung secara persial berpengaruh positif dengan arah yang positif, sedangkan Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintahan Kota Bandung. Namun secara simultan Kualitas SDM, Perangkat Pendukung dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua pada Pemerintahan Kota Bandung.

Penelitian dari Jaladri dan Riharjo (2016) dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) Surabaya, yang melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerpan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana, dan komitmen organisasi terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrua. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat

Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sedangkan sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana serta komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian dari Safitri (2017) dari Universitas Riau Pekanbaru, yang melakukan penelitian dengan judul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen organisasi dan komunikasi mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan data primer yakni data dari kuisioner yang diisi oleh responden. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD khususnya kantor, badan, dan dinas dibawah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pengelola keuangan pada kantor badan dan dinas di lingkungan pemerintah kabupaten Bengkalis. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 20.00 untuk mengolah data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi dan komunikasi secara parsial berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penelitian dari Ajhar, dkk (2015) dari Universitas Mataram, yang melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa SDM, SPI, dan TI merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilakukan pada 37 satuan kerja perangkat daerah kabupaten Dompu. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS lingkup pemda Dompu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah disproportionate stratified random sampling. Analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian atau biasa disebut dengan soft modeling, dengan menggunakan alat analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM

berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, TI berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, dan Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SPI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian dari Rahmansah (2012) dari Universitas Terbuka Jakarta, yang melakukan penelitian dengan judul Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang faktor – faktor yang mendukung keberhasilan penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual yaitu, regulasi, komitmen, sumber daya manusia, dan perangkat pendukung. Metode pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah *simple random sampling*. Metode analisis data menggunakan alat bantu program SPSS pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi dan sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, komitmen dan perangkat pendukung tidak

berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian Karyogis dan Putra (2017) dari Universitas Udayana Bali yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Bangli, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua. Lokasi penelitian dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sampel penelitian ini adalah pegawai penatausahaan keuangan yang sudah Pegawai Negeri Sipil, dan menjabat minimal selama satu tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua di Kabupaten Bangli.

Penelitian dari Jantong (2017) dari Universitas Brawijaya Malang yang melakukan penelitian dengan judul Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintahan daerah dalam menerapkan standart akuntansi pemerintahan

berbasis akrual pengaruh pelatihan, pendampingan dan pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi dan infrastruktur terhadap kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual, metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan secara positif mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, namun kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
----	----------	------------------	---------------------	---------------	------------------

1	Rahmansah (Universitas Terbuka) Tahun 2012	Faktor – Faktor Yang mempengaruhi keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada pemerintahan provinsi kepulauan Bangka Belitung	Regulasi, Komitmen, Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung.	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Regulasi dan Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, sedangkan faktor komitmen dan perangkat pendukung tidak berpengaruh
2	Ajhar, dkk (Universitas Mataram) Tahun 2015	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompus)?	Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal dan Teknologi Informasi	SEM (Structural Equation Modelling)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, TI berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual, dan Kesiapan penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan SDM tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, SPI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan TI tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Lanjutan Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu					
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
3	Putra dan Ariyanto (Universitas	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Kualitas Sumber Daya Manusia,	Analisis Regresi	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia,

	Udayana Bali) Tahun 2015	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar	Komunikasi, Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan	Linier Berganda	Komunikasi, Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Positif Terhadap Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar.
4	Widyastutik, dkk (Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja Bali) Tahun 2015	Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar Di Kabupaten Gianyar	Sumber Daya manusia, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi	Metode Kualitatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dari Sumber Daya Manusia Pemerintahan Kabupaten Gianyar Belum siap, Kesiapan dari SIA (Sistem Informasi Akuntansi) Sudah ada sistem khusus yang bernama Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Komitmen Organisasi Sangat Mendukung Penerapan SAP Berbasis Akruar
5	Jalardi dan Riharjo (STESIA) Surabaya Tahun 2016	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerpan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar	Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi Berpengaruh positif Terhadap Efektivitas Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar di Kab Sidoarjo, Sedangkan Kualitas Sumber Daya Manusia tidak Berpengaruh Signifikan
Lanjutan Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu					
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian

6	Arih, dkk (Universitas Telkom Bandung) Tahun 2017	Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standart Akuntansi “Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Kota Bandung	Kualitas Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung dan Gaya Kepemimpinan	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung Berpengaruh positif Terhadap Kesiapan Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kota Bandung, Namun Gaya Kepemimpinan tidak Berpengaruh Signifikan
7	Jantong (Universitas Brawijaya) Malang Tahun 2017	Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur	Pelatihan, Pendampingan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Infrastruktur	Analisis Regresi Linier Berganda	hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan secara positif mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, namun kualitas sumber daya manusia dan sarana dan prasarana tidak berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
8	Karyogis dan Putra (Universitas Udayana) Bali Tahun 2017	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Di Kabupaten Bangli	Kompetensi Sumber Daya manusia, Komitmen Organisasi dan pemanfaatan teknologi Informasi.	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bangli.
Lanjutan Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu					

No	Peneliti	Rumusan Masalah	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
9	Safitri (Universitas Riau Pekanbaru) Tahun 2017	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bengkalis)	Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi dan Komunikasi	Analisis Regresi Linier Berganda	Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Komitmen Organisasi dan Komunikasi Berpengaruh positif Terhadap Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Kab Bengkalis.

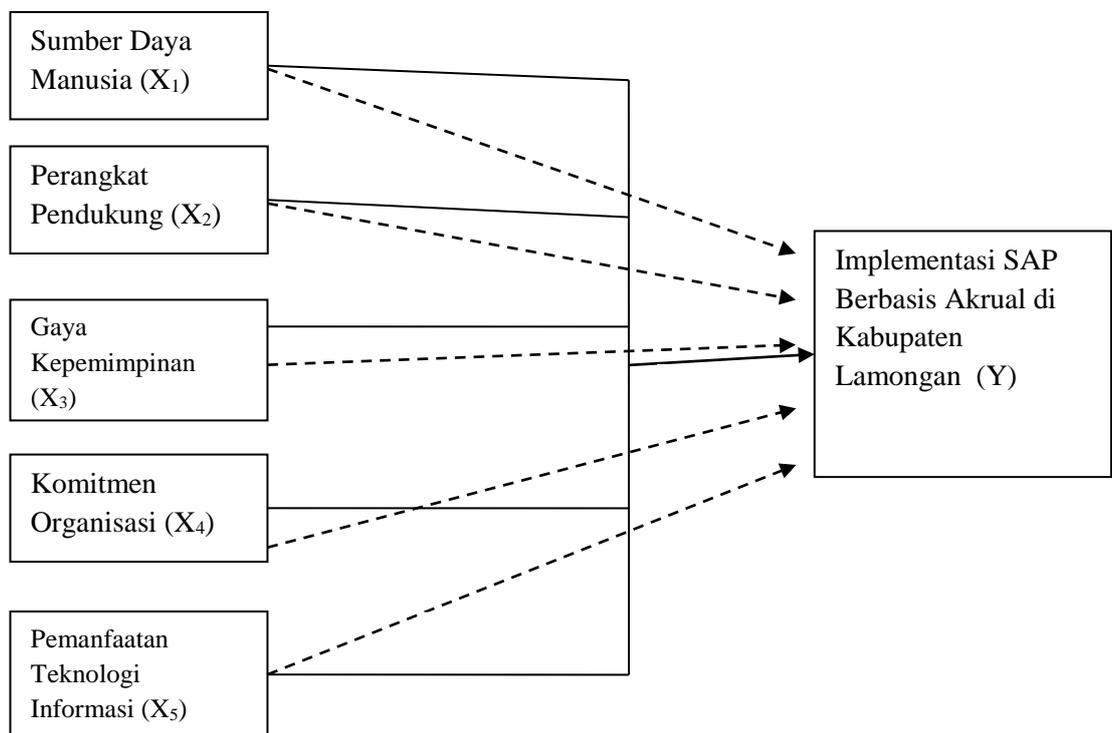
Sumber : Penelitian Terdahulu

2.3 Hipotesis

1. Faktor Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara persial berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan
2. Faktor Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh secara Simultan terhadap Implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan Perumusan Hipotesis diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Gambar Model Analisis



Keterangan :

..... = Persial

_____ = Simultan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Menurut (Kuncoro, 2011 : 3 - 4) Metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi, pendekatan analisis kuantitatif terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan mengimpelemntasikan hasil.

3.2 Populasi Sampel dan, metode pengambilan sampel

3.2.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari elemen – elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Elemen tersebut dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa atau segala sesuatu yang menarik untuk diamati/ diteliti (Chandrarin, 2017 : 125). Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah staf – staf yang berada di 36 OPD (Organnisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Lamongan, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.1
REKAPITULASI JUMLAH POPULASI PENELITIAN

NO	UNIT ORGANISASI	MENURUT JENIS KELAMIN		
		PRIA	WANITA	JUMLAH
1	SEKRETARIAT DAERAH	105	59	164
2	SEKRETARIAT DPRD	13	11	24
3	DINAS PENDIDIKAN	2,822	2,693	5,515
4	DINAS PERHUBUNGAN	58	8	66
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	27	5	32
6	DINAS KESEHATAN	403	803	1,206
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	16	14	30
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	55	21	76
9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	40	5	45
10	DINAS PERIKANAN	35	19	54
11	DINAS SOSIAL	15	10	25
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	46	9	55
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	18	10	28
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	32	11	43
15	INSPEKTORAT	24	15	39
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19	17	36
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	6	24
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17	12	29
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	7	27
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	13	11	24
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	30	14	44
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15	3	18
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	13	12	25
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18	7	25
25	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13	8	21
26	DINAS KETAHANAN PANGAN	14	9	23
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	63	2	65
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24	17	41
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	37	15	52
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	23	13	36
31	DINAS TENAGA KERJA	18	12	30
32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	93	51	144
33	DINAS KEARSIPAN DAERAH	21	5	26
34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	91	10	101
35	DINAS PU SUMBER DAYA AIR	83	2	85
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	16	13	29
JUMLAH		4,368	3,939	8,307

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab Lamongan

3.2.2 Sampel

merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (*representative*) anggota populasi. (Chandrarini, 2017 : 125). Sampel dalam penelitian ini sendiri adalah Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Petugas Asset dalam tiap – tiap OPD.

3.2.3 Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Judgement Sampling*. Menurut Suryani dan Hendryadi (2015:190) sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel penelitiannya, sedangkan sampel dalam penelitian ini sendiri adalah Bendahara pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan petugas Asset, alasan dipilihnya sampel tersebut ialah :

1. Bendahara Pengeluaran di OPD, alasan di pilihnya bendahara pengeluaran untuk di jadikan sampel dalam penelitian ini dikarenakan bendahara pengeluaran terlibat langsung dalam pencatatan belanja baik belanja Operasional, belanja barang dan jasa maupun belanja modal. serta penyusunan Laporan Keuangan. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Bendahara Pengeluaran mengerti dan memahami tentang implementasi Standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
2. Bendahara Penerimaan, alasan dipilihnya Bendahara penerimaan sebagai sampel dalam penelitian ini di karenakan bendahara penerimaan terlibat

langsung terhadap pencatatan pendapatan atau penerimaan yang diperoleh OPD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa Bendahara Penerimaan mengerti dan memahami tentang implementasi Standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

3. Petugas Asset, alasan dipilihnya petugas asset sebagai sampel dalam penelitian ini di karenakan petugas asset bertugas untuk mencatat nilai asset tetap beserta akumulasi penyusutan maupun asset lancar di OPD. Sehingga dapat di asumsikan bahwa petugas asset mengerti dan memahami tentang implementasi Standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
REKAPITULASI JUMLAH SAMPEL PENELITIAN

NO	UNIT ORGANISASI				JUMLAH
		Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerimaan	Petugas Asset	
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	1	1	3
2	SEKRETARIAT DPRD	1	1	1	3
3	DINAS PENDIDIKAN	1	1	1	3
4	DINAS PERHUBUNGAN	1	1	1	3
5	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	1	1	3
6	DINAS KESEHATAN	1	1	1	3
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	1	1	3
8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	1	1	3
9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	1	1	1	3
10	DINAS PERIKANAN	1	1	1	3
11	DINAS SOSIAL	1	1	1	3
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	1	1	3
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	1	1	1	3
14	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	1	1	3
15	INSPEKTORAT	1	1	1	3
16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	1	1	3
17	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	1	1	3
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	1	1	3
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	1	1	3
20	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	1	1	3
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1	1	1	3
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	1	1	3
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	1	1	1	3
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	1	1	3
25	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	1	1	3
26	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	1	1	3
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	1	1	3
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	1	3
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	1	1	3
30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	1	1	3
31	DINAS TENAGA KERJA	1	1	1	3
32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1	1	1	3
33	DINAS KEARSIPAN DAERAH	1	1	1	3
34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	1	3
35	DINAS PU SUMBER DAYA AIR	1	1	1	3
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	1	1	3
JUMLAH					108

Sumber : Data Primer Diolah

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependent

Menurut Chandrarin (2017 : 83) Variabel dependent merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau focus peneliti. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual diuji menggunakan 10 (sepuluh) pernyataan dari Karyogis dan Putra : 2017 dengan pernyataan sebagai berikut :

- 1) Saya paham SAP berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial.
- 2) Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintahan.
- 3) Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaranya.
- 5) Saya paham dan bisa menyediakan informasi dan cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

- 7) Saya paham asset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintahan, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun – akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP berbasis akrual.
- 8) Saya paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening kas umum Negara/ daerah atau oleh entitas pelaporan, dan pendapatan yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan dalam SAP berbasis akrual.
- 9) Saya paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan, dan beban yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan SAP berbasis akrual.
- 10) Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program / kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah.

3.3.2 Variabel Independent

Menurut Chandrarin (2017:83) Variabel Independent yang diduga berpengaruh terhadap variabel dependent. Variabel independent dikenal juga sebagai Variabel pemerediksi (*predictor Variabel*), atau disebut juga dengan istilah Variabel bebas. Variabel Independent dalam penelitian ini ada 5 (Lima) yaitu :

1. Sumber Daya Manusia (X₁)

Variabel Independent pertama dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia Menurut Jalardi dan Riharjo (2016) Kualitas sumber daya manusia ini diukur dari kemampuan pengetahuannya (knowledge). Semakin banyak pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, maka semakin kuat daya saingnya. Menurut pengertian diatas dapat disimpulkan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu gerakan pengakuan terhadap pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan dampak yang optimal terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Variabel Sumber daya manusia diuji menggunakan 10 (sepuluh) pernyataan dari Arih,dkk (2017) yaitu

- 1). Latar belakang / jurusan pendidikan saya telah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaan saya saat ini.
- 2). Sebagai pegawai keuangan di instansi ini, saya memiliki pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
- 3). Saya memiliki keterampilan dalam mengoperasikan hardware dan software akuntansi pemerintahan dan mendukung target penerapan hasil yang maksimal.
- 4). Pengalaman saya sebelumnya sesuai dengan tugas saya saat ini di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan.

- 5). Pengalaman saya sebelumnya mendukung tugas saya saat ini dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan.
- 6). Saya memiliki kemampuan berbagi keterampilan mengoperasikan hardware dan software kepada personil bagian keuangan yang lain.
- 7). Saya memiliki kemampuan berbagi pengetahuan mengenai pelaksanaan basis akrual kepada sesama tenaga keuangan.
- 8). Saya memahami sepenuhnya isi PP No. 71 Tahun 2010.

2. Perangkat Pendukung (X₂)

Variabel independent kedua dalam penelitian ini adalah Perangkat pendukung, Menurut Jalardi dan Riharjo (2016) Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan untuk tercapainya visi dan misi, karena apabila sarana dan prasarana tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan menacapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat akan bisa mendukung terwujudnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual berjalan dengan efektif dan dapat juga mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel Perangkat Pendukung diuji menggunakan 5 (Lima) Lima pernyataan dari Arih, dkk (2017) yaitu :

- 1) Fasilitas computer dan perangkat keras pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan saya.
- 2) Fasilitas computer dan perangkat keras pendukung lainnya yang digunakan tidak bajakan (Legal)
- 3) Instansi memiliki software akuntansi berbasis akrual yang mendukung pengelolaan keuangan dengan optimal dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- 4) Software yang digunakan tidak bajakan (Legal)
- 5) Terdapat system keamanan antivirus yang selalu di – *update* tiap waktu.

3. Gaya Kepemimpinan (X₃)

Variabel independent ketiga dalam penelitian ini adalah Gaya kepemimpinan, Menurut Arih,dkk. (2017) semakin baik/sesuai gaya kepemimpinan dalam sector pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrual akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan yang baik tentunya akan membawa dampak kenyamanan dan kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaanya sehingga akan membawa dampak optimalisasi pencapaian tujuan organisasi, efektifitas, serta efisiensi dalam lingkup SAP berbasis akrual. Variabel Gaya kepemimpinan diukur menggunakan 6 (Enam) pernyataan, yaitu :

- 1) Pimpinan saya memberikan tanggung jawab secara jelas dan rinci, dan mudah dimengerti oleh staf

- 2) Pimpinan saya bersikap tegas kepada staf terkait tugas yang dikerjakan.
- 3) Pimpinan saya tidak keberatan mendukung keputusan staf yang dianggap
- 4) Saya merasa berani untuk tidak menerima keputusan dan tindakan pimpinan yang kurang tepat.
- 5) Pimpinan saya selalu melakukan diskusi partisipatif dengan staf untuk mendapatkan keputusan dalam menyelesaikan masalah.
- 6) Pimpinan saya menaruh kepercayaan dan member wewenang pada staf untuk melakukan tugasnya.

4. Komitmen Organisasi (X4)

Variabel Independent Keempat dalam penelitian ini adalah Komitmen Organisasi. Menurut Putra dan Ariyanto (2015) Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga dipusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah. Variabel Komitmen Organisasi diukur menggunakan 4 (Empat) Pernyataan dari (Jantong, : 2017) yaitu :

- 1) Saya berkeinginan memberikan segala upaya yang ada untuk membantu mensukseskan laporan keuangan berdasarkan SAP akrual.
- 2) Saya merasa bangga bahwa SKPD tempat saya bekerja mensosialisasikan PP No. 71 Tahun 2010 kepada pegawai penyusun laporan keuangan.
- 3) Penyusun dan penyelesaian laporan keuangan dengan andal dan tepat waktu menuntut sikap dan tanggung jawab saya.
- 4) Saya selalu melibatkan diri dalam mesosialisasikan SAP berbasis akrual.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₅)

Variabel Independent Kelima dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi. Menurut Slamet (2016) Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain system informasi berbasis teknologi computer atau *Website*. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur menggunakan 6 (dua) pernyataan dari (Karyogis dan Putra , 2017) yaitu :

- 1) Pemerintah daerah mempunyai *platform* pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana jangka menengah maupun jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas, dalam bidang keuangan, membutuhkan dukungan SAP.

- 2) Pemerintah didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan SAP *clear* dan *clean* dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang keuangan.
- 3) Pemerintah didukung oleh sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten.
- 4) Pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali.
- 5) Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana sistem perangkat lunak SAP.
- 6) Pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan sistem perangkat lunak SAP.

Masing – masing butir pernyataan di beri skor 1 – 5 , alternative jawaban adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	=	1
Kurang Setuju	=	2
Setuju	=	3
Sangat Setuju	=	4
Sangat Setuju Sekali	=	5

3.4 Instrumen Penelitian

Instumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisoner, kuisoner dalam penelitian ini berisikan pernyataan – pernyataan untuk mendapatkan bukti empiris terhadap perbedaan persepsi antara Pegawai SKPD di Kabupaten Lamongan yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan terhadap faktor – faktor yang membedakan implementasi SAP berbasis akrual di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Menurut Chandrarin (2017 : 125) data yang diperoleh dari sumber data primer harus diuji Validitas dan Realibilitasnya. Dalam penelitian ini pengujian validitas data diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas sedangkan pengujian hipotesis sendiri menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Dengan menggunakan bantuan program computer SPSS versi 20.

3.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali) dalam (Jalardi dan Riharjo, 2016). Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai Sig. (2-tailed) Pearson's Correlation lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (Ghozali) dalam (Karyogis dan Putra, 2017).

3.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Jalardi dan Riharjo, (2016) uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Putra dan Ariyanto, (2015) Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila berada di atas angka 0,60.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedasitas :

1) Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali) dalam (Safitri, 2017). Menurut Safitri (2017) model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan *kolmogrov smirnov*. kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang dalam tingkat alpha yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $sig > 0,05$.

2) Uji multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara Variabel independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali) dalam (Safitri, 2017)

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas begitu juga sebaliknya (Jalardi dan Riharjo, 2016).

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan perumusan hipotesis dalam penelitian ini, maka model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e$$

Keterangan :

Y : Implementasi SAP berbasis akrual

a : Konstanta

b_{1,2,3...} : Koefisien Regresi

X₁ : Sumber Daya Manusia

X₂ : Perangkat Pendukung

X₃ : Gaya Kepemimpinan

X₄ : Komitmen Organisasi

X₅ : Pemanfaatan Teknologi Informasi

1) Uji Koefisiensi Determinansi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar Kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Safitri, 2017).

2) Uji t

Menurut Chandrarin (2017 : 138) uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh masing – masing Variabel independent terhadap satu Variabel dependent senagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi. kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan signifikansi p. jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh Variabel independent terhadap satu Variabel dependent adalah secara statistic positif pada level alfa sebesar 5%.

3) Uji F

Menurut Chandrarin (2017 : 140) uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independent terhadap satu variabel dependent sebagaimana yang di formulasikan dalam suatu model persamaan regresi linier berganda sudah tepat (*Fit*). kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut (Suryani dan Hendaryadi, 2015 : 173) Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Metode atau pendekatan yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data yang bersifat primer ini dapat

menggunakan angket/ kuesioner, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Study Internet (*Internet Reaserch*)

Metode ini digunakan untuk mendapatkan literature, data maupun informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini yang dilakukan dengan menggunakan media internet.

3.5.2 Study Pustaka (*Library Reaserch*)

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari buku – buku, majalah, artikel yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai landasan teori.

3.5.3 Study Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrument kuisoner yang diberikan kepada Pegawai SKPD di Kabupaten Lamongan, dengan maksud untuk memperoleh data dan informasi yang berguna bagi penelitian ini.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Instansi – Instansi Pemerintahan yang berada pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2018 sampai Juni 2018.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebar kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Petugas Asset di 36 SKPD di Kabupaten Lamongan, Dari tabel 4.1 dibawah dapat dilihat bahwa dari 108 kuisoner yang disebar kepada Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Petugas Asset di 36 SKPD di Kabupaten Lamongan. Dapat dilihat bahwa ada 5 kuisoner yang tidak kembali dengan prosentase 4,6 % sedangkan kuisoner yang gugur atau kuisoner yang tidak dapat diolah ada 6 kuisoner dengan prosentase 5,6%, lalu sisanya yaitu 97 kuisoner dengan prosentase 89.8 % dapat diolah untuk kepentingan penelitian.

Tabel 4.1
Tabel Distribusi Kuisoner

Keterangan	Jumlah (Data)	Prosentase
Kuisoner Yang disebar	108	100.0%
Kuisoner Tidak Kembali	5	4.6%
Kuisoner Gugur	6	5.6%
Kuisoner Yang Dapat Diolah	97	89.8%

Sumber : Olah Data primer, 2018

Data demografi responden menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang ditemukan di lapangan. Data demografi responden dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (Empat) yaitu data demografi jenis kelamin responden, data demografi Latar belakang pendidikan responden, data demografi Usia Responden dan yang terakhir data demografi masa kerja responden. Dari Tabel 4.2 Tabel Demografi dibawah dapat dilihat bahwa jumlah responden dalam penelitian ini mayoritas adalah Laki – Laki dengan jumlah 67 Orang dengan Prosentase 69.1% sedangkan sisanya adalah responden Perempuan dengan Jumlah 30 Orang dengan Prosentase 30.9%. untuk usia responden mayoritas responden berumur 36 – 45 Tahun dengan Jumlah 54 Orang dengan Prosentase 55.7%, kemudian yang berumur > 45 Tahun ada 27 Orang dengan Prosentase 27.8%, sedangkan untuk usia < 36 Tahun ada 16 Orang dengan Prosentase 16.5%. untuk Tingkat Pendidikan responden mayoritas responden berpendidikan S1 dengan Jumlah 69 Orang dengan Prosentase 71.1%, kemudian responden yang berpendidikan D3 ada 24 Orang dengan Prosentase 24.7%, sedangkan responden dengan pendidikan S2 hanya 4 Orang dengan Prosentase 4.1%. untuk Lama Masa Kerja responden mayoritas responden memiliki masa kerja 5 - 10 Tahun dengan Jumlah 45 Orang dengan Prosentase 46.4%, kemudian yang memiliki masa kerja > 10 Tahun ada 41 Orang dengan Prosentase 42.3%, sedangkan untuk Masa Kerja < 5 Tahun ada 11 Orang dengan Prosentase 11.3%.

TABEL 4.2
DEMOGRAFI RESPONDEN

Keterangan		Jumlah (orang)	Presentase
Jenis Kelamin			
1.	Laki-laki	67	69.1%
2.	Perempuan	30	30.9%
Total		97	100.0%
Usia			
1.	< 36 Tahun	16	16.5%
2.	36 - 45 tahun	54	55.7%
3.	> 45 tahun	27	27.8%
Total		97	100.0%
Tingkat Pendidikan			
1.	D3	24	24.7%
2.	S1	69	71.1%
3.	S2	4	4.1%
Total		97	100.0%
Masa Kerja			
1.	< 5 tahun	11	11.3%
2.	5 - 10 tahun	45	46.4%
3.	> 10 tahun	41	42.3%
Total		97	100.0%

Sumber : data primer diolah, 2018

4.1.2 Hasil Uji Kualitas Data

Sebelum dilakukan pengujian selanjutnya maka akan dilakukan terlebih dahulu pengujian kualitas data yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

4.1.2.1 Hasil uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali) dalam (Jalardi dan Riharjo, 2016). Kriteria keputusan valid dinyatakan apabila nilai Sig. (2-tailed) Pearson's Correlation lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (Ghozali) dalam (Karyogis dan Putra, 2017). Dari tabel 4.3 dibawah dapat dilihat bahwa dari ke 39 item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai Sig. (2-tailed) Pearson's $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dalam kuisoner dinyatakan Valid. Dan bisa untk dilakukan pengujian selanjutnya.

TABEL 4.3

HASIL UJI VALIDITAS

Item	Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikan	Keterangan
X1A	.000	0,05	Valid
X1B	.000	0,05	Valid
X1C	.000	0,05	Valid
X1D	.000	0,05	Valid
X1E	.000	0,05	Valid
X1F	.000	0,05	Valid
X1G	.000	0,05	Valid
X1H	.000	0,05	Valid
X2A	.000	0,05	Valid
X2B	.000	0,05	Valid
X2C	.000	0,05	Valid

Tabel Lanjutan 4.3			
Item	Sig. (2-tailed)	Taraf Signifikan	Keterangan
X2D	.000	0,05	Valid
X2E	.000	0,05	Valid
X3A	.000	0,05	Valid
X3B	.000	0,05	Valid
X3C	.000	0,05	Valid
X3D	.000	0,05	Valid
X3E	.000	0,05	Valid
X3F	.000	0,05	Valid
X4A	.000	0,05	Valid
X4B	.000	0,05	Valid
X4C	.000	0,05	Valid
X4D	.000	0,05	Valid
X5A	.000	0,05	Valid
X5B	.000	0,05	Valid
X5C	.000	0,05	Valid
X5D	.000	0,05	Valid
X5E	.000	0,05	Valid
X5F	.000	0,05	Valid
Y1	.000	0,05	Valid
Y2	.000	0,05	Valid
Y3	.000	0,05	Valid
Y4	.000	0,05	Valid
Y5	.000	0,05	Valid
Y6	.000	0,05	Valid
Y7	.000	0,05	Valid
Y8	.000	0,05	Valid
Y9	.000	0,05	Valid
Y10	.000	0,05	Valid

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

4.1.2.2 Hasil uji reliabilitas

Menurut Jalardi dan Riharjo, (2016) uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Putra dan Ariyanto, (2015) Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* Instrumen dikatakan reliabel untuk mengukur variabel bila berada di atas angka 0,60. Dari tabel 4.4 dibawah dapat dilihat bahwa dari ke 39 item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan reliable dengan memiliki nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted $> 0,6$ nilai cronbach alpha, sehingga semua item pernyataan dinyatakan reliable dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

TABEL 4.4
HASIL UJI REABILITAS

Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1A	0.964	0,60	Reliabel
X1B	0.965	0,60	Reliabel
X1C	0.963	0,60	Reliabel
X1D	0.963	0,60	Reliabel
X1E	0.964	0,60	Reliabel
X1F	0.965	0,60	Reliabel
X1G	0.964	0,60	Reliabel
X1H	0.963	0,60	Reliabel
X2A	0.965	0,60	Reliabel

Tabel Lanjutan 4.4			
Item	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Cronbach's Alpha	Keterangan
X2B	0.965	0,60	Reliabel
X2C	0.965	0,60	Reliabel
X2D	0.963	0,60	Reliabel
X2E	0.965	0,60	Reliabel
X3A	0.965	0,60	Reliabel
X3B	0.965	0,60	Reliabel
X3C	0.963	0,60	Reliabel
X3D	0.963	0,60	Reliabel
X3E	0.964	0,60	Reliabel
X3F	0.965	0,60	Reliabel
X4A	0.965	0,60	Reliabel
X4B	0.965	0,60	Reliabel
X4C	0.964	0,60	Reliabel
X4D	0.963	0,60	Reliabel
X5A	0.963	0,60	Reliabel
X5B	0.963	0,60	Reliabel
X5C	0.965	0,60	Reliabel
X5D	0.963	0,60	Reliabel
X5E	0.963	0,60	Reliabel
X5F	0.963	0,60	Reliabel
Y1	0.964	0,60	Reliabel
Y2	0.965	0,60	Reliabel
Y3	0.965	0,60	Reliabel
Y4	0.963	0,60	Reliabel
Y5	0.963	0,60	Reliabel
Y6	0.963	0,60	Reliabel
Y7	0.963	0,60	Reliabel
Y8	0.963	0,60	Reliabel
Y9	0.965	0,60	Reliabel
Y10	0.966	0,60	Reliabel

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

4.1.3 Hasil Uji Koefisiensi Determinansi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar Kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi Variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Safitri, 2017). Dari tabel dibawah dapat dilihat nilai R sebesar 0,984 yang artinya korelasi variabel Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual sebesar 0,984 hal ini menunjukkan bahwa ada keeratan hubungan dari variabel independen terhadap variabel dependen, ini dikarenakan nilai R mendekati nilai 1. Selanjutnya dilihat dari nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai 0,968 atau 96,8% ini artinya sumbangsi variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh sebesar 96,8% terhadap variabel dependen dan sisanya 3.2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

TABEL 4.5
HASIL UJI KOEFISIENSI DETERMINANSI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984 ^a	.968	.967	1.145

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_Teknologi, Sumber_Daya_Manusia, Komitmen_Organisasi, Perangkat_Pendukung, Gaya_Kepemimpinan
b. Dependent Variable: Implementasi_SAP_Berbasis_Akrual

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

4.1.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Chandrarin (2017 : 138) uji t dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh masing – masing Variabel independent terhadap satu Variabel dependent sebagaimana yang diformulasikan dalam suatu model persamaan regresi. kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai t dan signifikansi p. jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka pengaruh Variabel independent terhadap satu Variabel dependent adalah secara statistic positif pada level alfa sebesar 5%. Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6:

TABEL 4.6
HASIL UJI T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.079	1.085		1.916	.058
Sumber_Daya_Manusia	.313	.029	.319	10.849	.000
Perangkat_Pendukung	.152	.061	.075	2.497	.014
Gaya_Kepemimpinan	.160	.065	.085	2.442	.017
Komitmen_Organisasi	.635	.070	.267	9.029	.000
Pemanfaatan_Teknologi	.464	.051	.368	9.062	.000

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

Berdasarkan nilai kostanta dan koefisiensi regresi pada tabel 4.6 diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.079 + 0,313 X_1 + 0,152 X_2 + 0,160 X_3 + 0,635 X_4 + 0,464 X_5$$

4.1.4.1 Hasil Koefisiensi Regresi

Dari persamaan regresi diatas nilai konstanta α sebesar 2,079 ini artinya variabel Dependent Implementasi SAP Berbasis Akrua bernilai positif sebesar 2,079, maka dapat dijelaskan :

1. Sumber Daya manusia

Nilai koefisiensi regresi variabel Sumber Daya manusia β_1 bernilai positif sebesar 0,313 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Sumber Daya manusia akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrua sebesar positif 0,313 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

2. Perangkat Pendukung

Nilai koefisiensi regresi variabel Perangkat Pendukung β_2 bernilai positif sebesar 0,152 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Perangkat Pendukung akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrua sebesar positif 0,152 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

3. Gaya Kepemimpinan

Nilai koefisiensi regresi variabel Gaya kepemimpinan β_3 bernilai positif sebesar 0,160 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Gaya Kepemimpinan akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrua sebesar positif 0,160 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

4. Komitmen Organisasi

Nilai koefisiensi regresi variabel Komitmen Organisasi β_4 bernilai positif sebesar 0,635 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Komitmen Organisasi akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis AkruaI sebesar positif 0,635 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Nilai koefisiensi regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi β_5 bernilai positif sebesar 0,464 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis AkruaI sebesar positif 0,464 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

4.1.4.2 Uji signifikansi t

Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa :

1. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai p variabel Sumber Daya Manusia sebesar $0,000 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Sumber daya Manusia berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akruaI.
2. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai p variabel Perangkat Pendukung sebesar $0,014 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Perangkat Pendukung berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akruaI.
3. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai p variabel Gaya Kepemimpinan sebesar $0,017 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Gaya

Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis aktual.

4. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai p variabel Komitmen Organisasi sebesar $0,000 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Komitmen Organisasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis aktual.
5. Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai p variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar $0,000 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis aktual.

4.1.4.3 Hasil Uji F

Menurut Chandrarin (2017 : 140) uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pengaruh semua variabel independent terhadap satu variabel dependent sebagaimana yang di formulasikan dalam suatu model persamaan regresi linier berganda sudah tepat (*Fit*). kriteria pengujiannya dengan menunjukkan besaran nilai F dan nilai signifikansi p. jika hasil analisis menunjukkan nilai $p \leq 0,05$ maka model persamaan regresinya signifikan pada level alfa sebesar 5%., Hasil Uji F pada tabel 4.7 dibawah dapat dilihat bahwa nilai p Sebesar $0.000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh secara simultan terhadap Implementasi SAP Berbasis aktual di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

TABEL 4.7
HASIL UJI F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3639.334	5	727.867	555.083	.000 ^b
	Residual	119.326	91	1.311		
	Total	3758.660	96			

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heterokedasitas.

4.1.5.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali) dalam (Safitri, 2017). Menurut Safitri (2017) model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan *kolmogrov smirnov*. kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang dalam tingkat alpha yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila sig > 0,05. Hasil uji *kolmogrov smirnov* dapat dilihat pada table 4.8 di bawah ini:

TABEL 4.8
HASIL UJI NORMALITAS
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11489008
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, menunjukkan bahwa nilai Z sebesar 1.090 dengan probabilitas 0,186 artinya nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

4.1.5.2 Hasil uji multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara Variabel independen. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali) dalam (Safitri, 2017)

Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa nilai tolerance memiliki nilai $> 0,10$ dan nilai Variance Inflation Faktor (VIF) < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas antara variabel independent

TABEL 4.9
HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

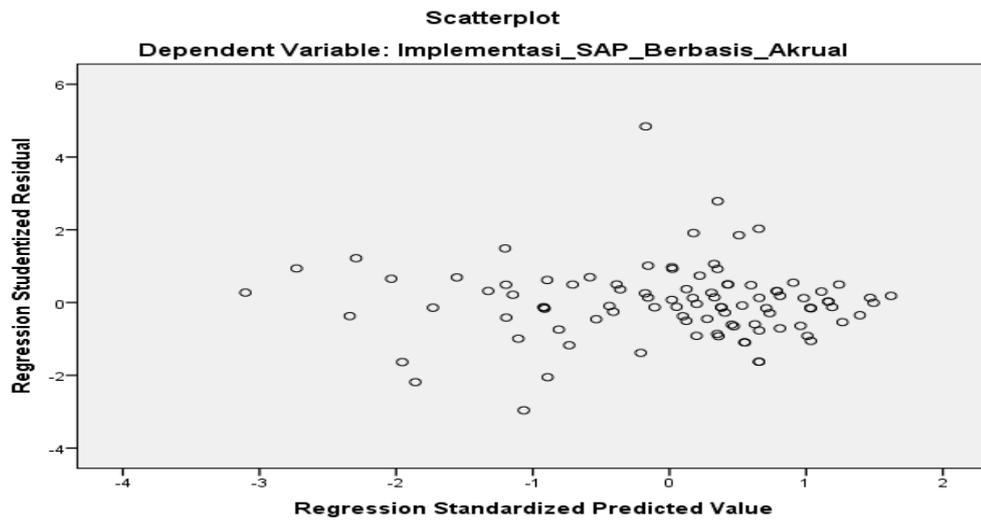
Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
Sumber_Daya_Manusia	.402	2.486	Bebas Multikolinieritas
Perangkat_Pendukung	.388	2.580	Bebas Multikolinieritas
Gaya_Kepemimpinan	.290	3.450	Bebas Multikolinieritas
Komitmen_Organisasi	.398	2.514	Bebas Multikolinieritas
Pemanfaatan_Teknologi	.212	4.715	Bebas Multikolinieritas

Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

4.1.5.3 Hasil uji heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas begitu juga sebaliknya (Jalardi dan Riharjo, 2016). Adapun hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.1:

GAMBAR 4.1.
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS



Sumber : olah data kuesioner, SPSS versi 20

Dari gambar diatas dapat dilihat titik-titik relative menyebar dengan rata dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada regresi.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh Sumber Daya Manusia, Perangkat pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua.

4.2.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua

Dari tabel 4.9 Nilai koefisien regresi variabel Sumber Daya manusia β_1 bernilai positif sebesar 0,313 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Sumber Daya manusia akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrua sebesar 0,313 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai positif variabel Sumber Daya Manusia sebesar $0,000 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Sumber daya Manusia berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua. Maka dari hasil uji t ini dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua. Sehingga hipotesis yang berbunyi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia sangat berperan terhadap kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Menurut Jantong (2017) Kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah sangat terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama operasi sebuah organisasi, termasuk jika ada perubahan dalam organisasi.

Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian dari Arih,dkk (2017) yang menyebutkan bahwa faktor Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian dari Putra dan Ariyanto (2015) menyebutkan bahwa faktor sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada SKPD di Kabupaten Badung.

4.2.2 Pengaruh Perangkat Pendukung terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Dari tabel 4.9. Nilai koefisiensi regresi variabel Perangkat Pendukung β_2 bernilai positif sebesar 0,152 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Perangkat Pendukung akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrual sebesar 0,152 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai positif variabel Perangkat Pendukung sebesar $0,014 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Perangkat Pendukung berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akrual. Sehingga hipotesis yang berbunyi Perangkat Pendukung secara persial

berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Pendukung sangat berperan terhadap kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut agar system akuntansi keuangan pemerintahan daerah beerjalan secara efektif maka diperlukan perangkat pendukung baik perangkat keras maupun perangkat lunak. (Rahmansah,2012).

Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian dari. Arih, dkk (2017) menjelaskan bahwa faktor perangkat pendukung berpengaruh secara persial terhadap Implementasi SAP berbasis Akrua pada Pemerintahan Kota Bandung. Hasil penelitian dari Norfalizah (2015) menjelaskan bahwa faktor perannkat pendukung berpengaruh positif terhadap penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrua di Kabupaten Rokan Hilir.

4.2.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua

Dari tabel 4.9 diatas Nilai koefisiensi regresi variabel Gaya kepemimpinan β_3 bernilai positif sebesar 0,160 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel

Gaya Kepemimpinan akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrua sebesar 0,160 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai positif variabel Gaya Kepemimpinan sebesar $0,017 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akrua. Sehingga hipotesis yang berbunyi Gaya Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perangkat Pendukung sangat berperan terhadap kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrua di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Menurut Arih, dkk (2017) Semakin baik/sesuai gaya kepemimpinan dalam sector pemerintahan, maka implementasi SAP berbasis akrua akan semakin baik. Hal ini disebabkan karena gaya kepemimpinan yang baik tentunya akan membawa dampak kenyamanan dan kemudahan bagi para pegawai dalam melakukan pekerjaannya sehingga akan membawa dampak optimalisasi pencapaian tujuan organisasi

Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian dari. Putra dan Ariyanto (2015) menemukan bahwa faktor gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrua. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi gaya kepemimpinan dalam SKPD, maka semakin tinggi pula tingkat

kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pemerintah daerah Kabupaten Badung.

4.2.4 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis

Akrual

Dari tabel 4.9 Nilai koefisiensi regresi variabel Komitmen Organisasi β_4 bernilai positif sebesar 0,635 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Komitmen Organisasi akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrual sebesar 0,635 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai positif variabel Komitmen Organisasi sebesar $0,000 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Komitmen Organisasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akrual. Sehingga hipotesis yang berbunyi Komitmen Organisasi secara persial berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan diterima..

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi sangat berperan terhadap kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Menurut Jalardi dan Riharjo (2016) Pada pemerintah daerah, aparat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk membuat anggaran menjadi lebih tepat. Kejelasan sasaran anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan.

Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen untuk tanggungjawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian dari Safitri (2017) menemukan bahwa secara persial komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian dari Karyogis dan Putra (2017) menemukan bahwa faktor komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan standart akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bangli.

4.2.5 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Nilai koefisiensi regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi β_5 bernilai positif sebesar 0,464 ini artinya setiap kenaikan satu satuan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi akan menaikkan Implementasi SAP Berbasis Akrual sebesar 0,464 dengan asumsi variabel bebas yang lain bernilai tetap.

Dari hasil uji t dapat dilihat bahwa nilai positif variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar $0,000 < 0,05$ taraf signifikansi ini artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis akrual. Sehingga hipotesis yang berbunyi Pemanfaatan Teknologi Informasi secara persial berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual di Pemerintahan Kabupaten Lamongan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi sangat berperan terhadap kesuksesan Implementasi SAP Berbasis Akruai di Pemerintahan Kabupaten Lamongan.

Penerapan SAP berbasis akruai memerlukan persiapan sistem informasi akuntansi yang memadai, agar seluruh kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada SAP berbasis akruai dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem informasi merupakan sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mukhtar, dalam Karyogis dan Putra 2017).

Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian dari. Supra (2016) menjelaskan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruai. Juga hasil penelitian dari Karyogis dan Putra (2017) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akruai.

4.2.6 Pengaruh secara Simultan Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akruai

Berdasarkan Hasil Uji F pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai p Sebesar $0.000 < 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh secara simultan

terhadap Implementasi SAP Berbasis akrual di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamongan. Sehingga hipotesis yang berbunyi Faktor Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh secara Simultan terhadap Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Pemerintahan Lamongan diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa di Pemerintahan Kabupaten Lamongan secara bersama – sama atau secara simultan Faktor Sumber Daya Manusia, Perangkat Pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi Implementasi SAP berbasis akrual.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Dari Hasil Uji t dapat dilihat bahwa secara Parsial atau secara Individu variabel Sumber daya Manusia, Perangkat pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh positif Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua di pemerintahan Kabupaten Lamongan.
2. Dari Hasil Uji F dapat dilihat bahwa secara simultan variabel Sumber daya Manusia, Perangkat pendukung, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua di pemerintahan Kabupaten Lamongan.

5.2 Saran

1. Kesimpulan dalam penelitian ini hanya diperoleh dari jawaban kuisioner responden penelitian, sehingga dalam penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan metode wawancara sehingga hasil penelitian selanjutnya akan ada perbandingan antara data kualitatif dan data kuantitatif.
2. Kesimpulan dalam penelitian ini hanya mewakili Pemerintahan di Kabupaten Lamongan saja. Jadi di harapkan pada penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian dengan lokasi penelitian yang lebih luas lagi, sehingga hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Agustiawan, Nyoman Triyadi dan Rasmini, Ni Ketut. 2016 . “Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, Ti, Dan Spip Pada Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sdm Sebagai Moderasi” . (ISSN : 2337-3067. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.10 (2016): 3475-3500). Universitas Udayana. Bali
- Ajhar, Akram dan Pituringsih, Endar. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis Akrua Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)” (*Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 3 Nomor 1 , januari 2015, halaman 62-73*). Universitas Mataram
- Arih, Tyas Ninditha. dkk. 2017. “ Analisa Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standart Akuntansi “Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Kota Bandung” (*Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 17 – No. 1 April 2017*). Universitas Telkom.Bandung
- Asri, Fadhillah. 2015 .“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua” (*Jom. FEKON Vol.2 No.1 Februari 2015*). Universitas Riau Pekanbaru.
- Herwiyanti, Eliada, dkk. 2017. “Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan”. (ISSN 1411-0288 print / ISSN 2338-8137 online. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 19, No. 1, Mei 2017, 13-23*). Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia.
- Jalardi, Engson Qinaris dan Riharjo, Ikhsan Budi. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua”. (ISSN : 2460-0585 *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 11, November 2016*). STESIA Surabaya.
- Jantong, Alfonsus. 2017. “Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Manggarai, Nusa Tenggara Timur” (*e- ISSN : 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 1 (1) (2017) : 109-119*). Universitas brawijaya malang.

- Karyogis, Kadek Nila dan Putra, I Made Pande Dwiana. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Bangli” (*ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.20.1. Juli (2017): 555-584*). Universitas Udayana. Bali
- Kristiyawati, Endang. 2015. “Faktor – Faktor Yang Meempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat” (*P- ISSN : 1979 – 858X Akuntabilitas Vol. VIII No.3 Desember 2015 Halaman 171-190*). Universitas Panca Bhakti Pontianak.
- Lamonisi, Sony. 2016. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon” (*ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016, Hal 223-230*). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Langelo, Friska, dkk. 2015. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung” . (*ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 1-8*). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Niu, Fitria Ayu Lestari, dkk. 2014. “Analisis Penerapan Pp. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu” (*ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 714-722*). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Norfaliza. 2015. “Analisis Faktor Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Rokan Hilir) “. (*Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*). Universitas Riau Pekanbaru.
- Puspitasari, Evita, dkk. 2016. “Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintah Daerah “(*ISBN : 978-602-17225-6-5 Forum Keuangan dan Bisnis V, Tahun 2016*) . Universitas Padjadjaran. Bandung
- Putra, I Wayan Gede Yogiswara Darma dan Ariyanto, Dodik. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua”. (*ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 (2015): 14-32*). Universitas Udayana Bali

- Ranuba, Erlita D.S, dkk. 2015. “Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Berdasarkan Pp No. 71 Tahun 2010 Pada Dpkpa Minahasa Selatan” (*ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA 388 Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 388-397*). Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Riyani, Yani, dkk. 2017. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah Kota Pontianak” (*Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 6 2 Juli 2017, Hal 157 – 166*). Politeknik Negeri Pontianak.
- Rosyadi, Mokhammad Idham dan Mulyani, Sri. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Di Pemerintah Kota Bekasi (Studi Kasus Satuan Kerja Perangkat Kerja Pemerintah Kota Bekasi) “ (*PROCEEDINGS ISSN – 2252-3936*). Universitas Padjadjaran Bandung.
- Safitri, Devi. 2017. “Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI (Studi Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Bengkalis)” (*ISSN 2337-4314 Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 2, April 2017 : 174-189*). Universitas Riau, Pekanbaru.
- Slamet, Budiman. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilanpenerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bekasi)” (*E – ISSN 2502-4159 JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 2 No. 2 Tahun 2016, Hal 1-15*) Universitas Widyaiswara Utama Pusdiklatwas BPKP.
- Sukadana, Ikrima Chikita dan Mimba, Ni Putu sri Harta. 2015. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis AkruaI Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Denpasar” (*ISSN : 2302-8556 E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.1 (2015) 35-49*). Universitas Udayana Bali.
- Supra, Deswati. 2016. “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin” (*ISSN –P 2407-2184 Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY) Volume V, No. 2 Agustus 2016. Halaman 9-23*). STIE Rahmadiyah Sekayu.

Widyastuti, Ni Made Ari. Sujana, Edi. dan Adi, Putra Made Pradana. 2015. “Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Kabupaten Gianyar” (*e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi (Volume 3 No.1 Tahun 2015)*). Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.

Wiranti, Ira Mustika. 2016. “Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada SKPD Kabupaten Ponorogo (Analysis Of The Readiness Of The Government In Implementing PP No.71 Of 2010 On Government Accounting Standards In The District SKPD Ponorogo)” *Artikle Ilmiah Mahasiswa 2016. Universitas Jember, Jember.*

Buku :

Chandrarin, Grahita . 2017. “ *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*” Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2011. “ *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk bisnis edisi keempat*”. penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua.

Sarwono, Jonathan. 2010. “ *PASW Statistics 18 – Belajar Statistik Menjadi Mudah dan Cepat*”. Penerbit : CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta.

Suryani dan Hendrayadi. 2015. “ *Metode Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam Edisi Pertama*, penerbit prenadamedia group, Jakarta.

Tesis :

Rahmansah. 2012. “ *Faktor – Faktor Yang mempengaruhi keberhasilan penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pada pemerintahan provinsi kepulauan Bangka Belitung*” Tesis Tidak diterbitkan. Universitas Terbuka Jakarta.

Website :

<http://surabaya.bpk.go.id/new/?p=18525>

Lampiran I

KUESIONER PENELITIAN

Responden Yth.

Saya sedang melakukan penelitian tentang **“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Study Empiris Pada Lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan)”** untuk memperoleh data tersebut, saya mohon kesediaan anda untuk mengisi kuisoner ini dengan benar karena data yang anda berikan sangat berarti bagi penelitian yang ingin saya lakukan. Kesediaan anda untuk mengisi kuisoner ini merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi saya, atas perhatian dan kesediaan anda saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat saya

Rochman Arif

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : *(boleh tidak diisi)*
 Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *(coret yang tidak perlu)*
 Umur :
 Pendidikan terakhir :
 Asal Instansi :
 Masa Kerja :
 Jabatan : a. Bendahara Pengeluaran *(Coret Yang tidak Perlu)*
 b. Bendahara Penerimaan
 c. Petugas Asset

B. DAFTAR KUESIONER

Petunjuk Pengisian dan Keterangan:

Untuk setiap pernyataan berikut ini, mohon anda beri tanda centang (√) pada salah satu kolom sesuai dengan pendapat anda, dan setiap pernyataan diukur menggunakan skala 1 s.d 5 dengan keterangan sebagai berikut :

- 1 = Sangat tidak setuju
- 2 = Kurang setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat setuju
- 5 = Sangat setuju sekali

Isilah semua pernyataan dalam kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan.

1. Sumber Daya Manusia

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
a. Latar belakang / jurusan pendidikan saya telah sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dalam pekerjaan saya saat ini.					
b. Sebagai pegawai keuangan di instansi ini, saya memiliki pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual.					
c. Saya memiliki keterampilan dalam mengoperasikan hardware dan software akuntansi pemerintahan dan mendukung target penerapan hasil yang maksimal.					

d. Pengalaman saya sebelumnya sesuai dengan tugas saya saat ini di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan.					
e. Pengalaman saya sebelumnya mendukung tugas saya saat ini dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan.					
f. Saya memiliki kemampuan berbagi keterampilan mengoperasikan hardware dan software kepada personil bagian keuangan yang lain.					
g. Saya memiliki kemampuan berbagi pengetahuan mengenai pelaksanaan basis akrual kepada sesama tenaga keuangan.					
h. Saya memahami sepenuhnya isi PP No. 71 Tahun 2010.					

2. Perangkat Pendukung

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
a. Fasilitas komputer dan perangkat keras pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan saya.					

b. Fasilitas komputer dan perangkat keras pendukung lainnya yang digunakan tidak bajakan (Legal)					
c. Instansi memiliki software akuntansi berbasis akrual yang mendukung pengelolaan keuangan dengan optimal dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.					
d. Software yang digunakan tidak bajakan (Legal)					
e. Terdapat system keamanan antivirus yang selalu di <i>update</i> tiap waktu.					

3. Gaya Kepemimpinan

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
a. Pimpinan saya memberikan tanggung jawab secara jelas dan rinci, dan mudah dimengerti oleh staf.					
b. Pimpinan saya bersikap tegas kepada staf terkait tugas yang dikerjakan.					
c. Pimpinan saya tidak keberatan mendukung keputusan staf yang di anggap.					
d. Saya merasa berani untuk tidak menerima keputusan dan tindakan pimpinan yang kurang tepat.					

e. Pimpinan saya selalu melakukan diskusi partisipasi dengan staf untuk mendapatkan keputusan dalam menyelesaikan masalah.					
f. Pimpinan saya menaruh kepercayaan dan member wewenang pada staf untuk melakukan tugasnya.					

4. Komitmen Organisasi

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
a. Saya berkeinginan memberikan segala upaya yang ada untuk membantu mensukseskan laporan keuangan berdasarkan SAP akrual.					
b. Saya merasa bangga bahwa SKPD tempat saya bekerja mensosialisasikan PP No. 71 tahun 2010 kepada pegawai penyusun laporan keuangan.					
c. Penyusun dan penyelesaian laporan keuangan dengan andal dan tepat waktu menuntut sikap tanggung jawab saya.					
d. Saya selalu melibatkan diri dalam mensosialisasikan SAP berbasis akrual.					

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
a. Pemerintah daerah mempunyai <i>platform</i> pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam rencana jangka menengah maupun jangka pendek dengan transparansi, akuntabilitas, dalam bidang keuangan, membutuhkan dukungan SAP.					
b. Pemerintah didukung oleh system mekanisme penyelenggaraan SAP <i>clear</i> dan <i>clean</i> dalam meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang keuangan.					
c. Pemerintah didukung oleh system manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat, presisi di tingkat pemerintah provinsi sampai kabupaten.					
d. Pemerintah didukung oleh sistem dalam perangkat lunak SAP yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi perubahan yang berulang kali					

e. Pemerintah didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku pelaksana system perangkat lunak SAP.					
f. Pemerintah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan system perangkat lunak SAP.					

6. Implementasi SAP Berbasis AkruaI

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
a. Saya paham SAP berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial.					
b. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah.					
c. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.					
d. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.					

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
e. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai informasi dan cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.					
f. Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.					
g. Saya paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan akun-akun yang dimaksud telah dicatat sesuai ketentuan SAP berbasis akrual.					
h. Saya paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan, dan pendapatan yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan dalam					

Menurut Anda :	Sangat Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat Setuju Sekali
SAP berbasis akrual					
i. Saya paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan, dan beban yang dimaksud telah diakui sesuai ketentuan SAP berbasis akrual.					
j. Saya paham laporan operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah.					

Lampiran II

Hasil Uji Validitas Item variabel Sumber Daya Manusia

Correlations		
		TOTAL
X1A	Pearson Correlation	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1B	Pearson Correlation	.612**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1C	Pearson Correlation	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1D	Pearson Correlation	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1E	Pearson Correlation	.846**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1F	Pearson Correlation	.603**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1G	Pearson Correlation	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X1H	Pearson Correlation	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	97
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).		

Lampiran III

Hasil Uji Validitas Item variabel Perangkat Pendukung

Correlations		
		TOTAL
X2A	Pearson Correlation	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X2B	Pearson Correlation	.438**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X2C	Pearson Correlation	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X2D	Pearson Correlation	.725**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X2E	Pearson Correlation	.465**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	97
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).		

Lampiran IV

Hasil Uji Validitas Item variabel Gaya kepemimpinan

Correlations		
		TOTAL
X3A	Pearson Correlation	.653**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X3B	Pearson Correlation	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X3C	Pearson Correlation	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X3D	Pearson Correlation	.823**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X3E	Pearson Correlation	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X3F	Pearson Correlation	.569**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	97

Lampiran V

Hasil Uji Validitas Item variabel Komitmen Organisasi

Correlations		
		TOTAL
X4A	Pearson Correlation	.603**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X4B	Pearson Correlation	.627**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X4C	Pearson Correlation	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X4D	Pearson Correlation	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	97

Lampiran VI

Hasil Uji Validitas Item variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Correlations		
		TOTAL
X5A	Pearson Correlation	.966**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X5B	Pearson Correlation	.977**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X5C	Pearson Correlation	.527**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X5D	Pearson Correlation	.977**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X5E	Pearson Correlation	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
X5F	Pearson Correlation	.967**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	97

Lampiran VII

Hasil Uji Validitas Item variabel Implementasi SAP Berbasis Akrua

Correlations		
		TOTAL
Y1	Pearson Correlation	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y2	Pearson Correlation	.553**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y3	Pearson Correlation	.425**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y4	Pearson Correlation	.904**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y5	Pearson Correlation	.904**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y6	Pearson Correlation	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y7	Pearson Correlation	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y8	Pearson Correlation	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y9	Pearson Correlation	.474**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
Y10	Pearson Correlation	.417**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	97
TOTAL	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	97

Lampiran VIII

Hasil Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1A	151.52	543.502	.644	.964
X1B	151.41	550.745	.496	.965
X1C	151.43	536.936	.902	.963
X1D	151.45	535.125	.765	.964
X1E	151.59	544.662	.619	.964
X1F	151.45	551.834	.480	.965
X1G	151.61	544.574	.588	.965
X1H	151.53	536.335	.764	.964
X2A	151.44	556.666	.370	.966
X2B	150.99	560.885	.379	.965
X2C	151.49	557.628	.347	.966
X2D	151.46	537.272	.903	.963
X2E	151.44	551.770	.483	.965
X3A	151.24	557.183	.424	.965
X3B	150.77	566.323	.358	.965
X3C	151.43	536.936	.902	.963
X3D	151.42	536.559	.904	.963
X3E	151.10	555.218	.500	.965
X3F	150.78	566.567	.347	.965
X4A	151.46	558.835	.345	.966
X4B	150.93	560.380	.410	.965
X4C	151.64	545.900	.699	.964
X4D	151.46	535.168	.768	.964
X5A	151.43	536.936	.902	.963
X5B	151.42	536.747	.900	.963
X5C	151.38	555.738	.397	.966
X5D	151.42	536.747	.900	.963
X5E	151.45	537.542	.889	.963
X5F	151.44	536.999	.895	.963
Y1	151.55	544.167	.637	.964
Y2	151.37	550.548	.510	.965
Y3	151.37	556.194	.389	.966
Y4	151.45	537.334	.906	.963
Y5	151.45	537.334	.906	.963
Y6	151.61	544.866	.742	.964
Y7	151.48	538.086	.886	.963
Y8	151.51	535.919	.771	.964
Y9	150.93	560.380	.410	.965
Y10	150.97	564.509	.324	.966

Lampiran IX

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11489008
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.082
Kolmogorov-Smirnov Z		1.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.186

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

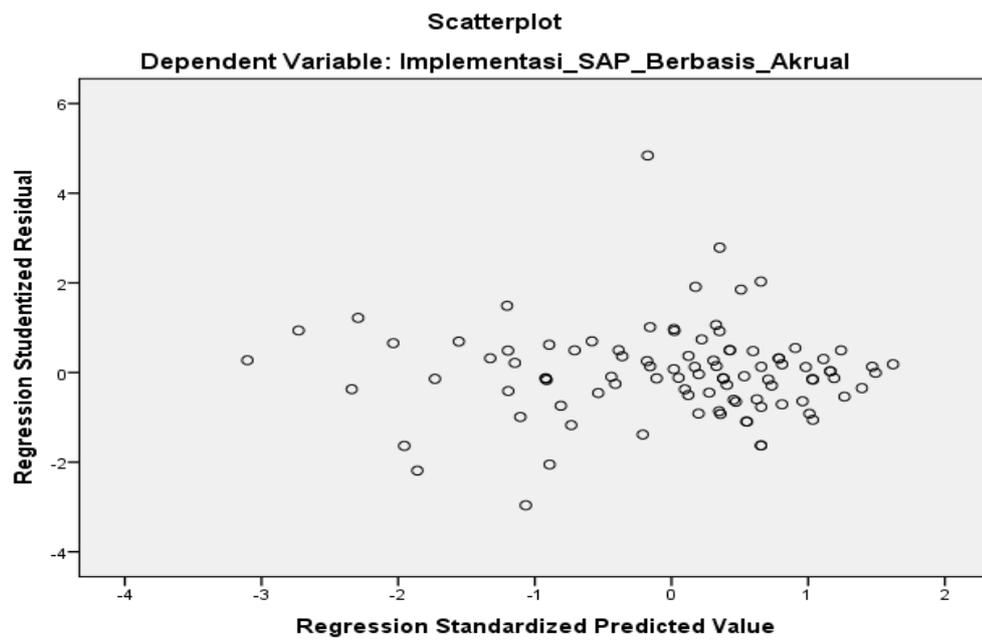
Lampiran X

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sumber_Daya_Manusia	.402	2.486
Perangkat_Pendukung	.388	2.580
Gaya_Kepemimpinan	.290	3.450
Komitmen_Organisasi	.398	2.514
Pemanfaatan_Teknologi	.212	4.715

a. Dependent Variable:
Implementasi_SAP_Berbasis_Akrual

Lampiran XI**Hasil Uji Heterokedasitas**

Lampiran XII

Hasil Uji Koefisiensi Determinansi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.984 ^a	.968	.967	1.145	.968	555.083	5	91	.000

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_Teknologi, Sumber_Daya_Manusia, Komitmen_Organisasi, Perangkat_Pendukung, Gaya_Kepemimpinan

b. Dependent Variable: Implementasi_SAP_Berbasis_Akrual

Lampiran XIII**Hasil Uji F****ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3639.334	5	727.867	555.083	.000 ^b
Residual	119.326	91	1.311		
Total	3758.660	96			

a. Dependent Variable: Implementasi_SAP_Berbasis_Akrual

b. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_Teknologi, Sumber_Daya_Manusia, Komitmen_Organisasi, Perangkat_Pendukung, Gaya_Kepemimpinan

Lampiran XIV

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.079	1.085		1.916	.058					
Sumber_Daya_Manusia	.313	.029	.319	10.849	.000	.864	.751	.203	.402	2.486
Perangkat_Pendukung	.152	.061	.075	2.497	.014	.768	.253	.047	.388	2.580
Gaya_Kepemimpinan	.160	.065	.085	2.442	.017	.841	.248	.046	.290	3.450
Komitmen_Organisasi	.635	.070	.267	9.029	.000	.858	.687	.169	.398	2.514
Pemanfaatan_Teknologi	.464	.051	.368	9.062	.000	.908	.689	.169	.212	4.715

a. Dependent Variable: Implementasi_SAP_Berbasis_Akrual